

Analisis Penerapan Environmental Accounting Pada Perlakuan Atas Biaya Lingkungan Di Puskesmas Cipageran Kota Cimahi

Analysis The Application Environmental Accounting The Treatment Environmental Costs Cipageran Community Health Center, Cimahi City

Selpia Rahmawati¹, Dian Anita²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Selpia Rahmawati, email: selpia10221170@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diajukan: 11/07/2025
Diterima: 13/07/2025
Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:
Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Perlakuan.

A B S T R A K

Puskesmas Cipageran Kota Cimahi merupakan instansi pemerintah yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan layanan kesehatannya, Puskesmas ini memiliki potensi menghasilkan limbah, baik limbah medis padat maupun cair. Pengelolaan limbah tersebut menjadi penting untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk bagi pegawai Puskesmas, pasien, pengunjung, serta masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi lingkungan di Puskesmas Cipageran, perlakuan terhadap biaya lingkungan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah dan pelaksanaan akuntansi lingkungan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penelaahan laporan keuangan yang memuat informasi terkait biaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Cipageran telah menjalankan tahapan akuntansi, seperti identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian biaya lingkungan. Biaya lingkungan telah dicatat sesuai dengan tanggung jawab institusi dalam pengelolaan limbah. Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja khusus yang bertugas mengoperasikan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

A B S T R A C T

Cipageran Health Center, Cimahi City is a government agency with the status of a Regional Public Service Agency (BLUD) in the health sector. In implementing its health services, this Health Center has the potential to produce waste, both solid and liquid medical waste. Management of this waste is important to avoid negative impacts on the environment, including for Health Center employees, patients, visitors, and the surrounding community. This study aims to evaluate the implementation of environmental accounting at Cipageran Health Center, the treatment of environmental costs, and the obstacles faced in waste management and implementation of environmental accounting. The research methodology used is descriptive qualitative with data collection through interviews and review of financial reports containing information related to environmental costs. The results of the study indicate that Cipageran Health Center has carried out accounting stages, such as identification, recognition, measurement, recording, and presentation of environmental costs. Environmental costs have been recorded in accordance with the institution's responsibilities in waste management. However, one of the obstacles faced is the lack of special workers tasked with operating the wastewater treatment installation (IPAL) system.

Keywords:
*Environmental Accounting,
Environmental Costs, Treatment*

*This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i8>

e – ISSN: 2656-6362
p – ISSN: 2614-6681

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di tengah kemajuan industri dan pembangunan, kerusakan lingkungan menjadi isu yang semakin krusial. Salah satu penyebab utama adalah minimnya perhatian terhadap pencemaran dan limbah, khususnya di sektor pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Penerapan akuntansi lingkungan menjadi salah satu solusi strategis dalam menanggapi permasalahan tersebut karena dapat membantu lembaga mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara sistematis dan terpadu guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun dalam praktiknya, penerapan akuntansi lingkungan di berbagai instansi, termasuk di Puskesmas, belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi akuntansi yang secara khusus mengatur penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan sektor publik. Padahal, akuntansi lingkungan memegang peran penting dalam mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan operasional suatu institusi.

Puskesmas Cipageran Kota Cimahi merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam aktivitas operasionalnya, puskesmas ini menghasilkan limbah medis maupun non-medis yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar jika tidak dikelola secara benar. Meski sudah terdapat sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti belum adanya operator khusus serta pelaporan biaya lingkungan yang belum terstruktur dan transparan.

Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akuntansi lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak yang masih menganggap akuntansi semata-mata sebatas pada hitung-menghitung angka tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekologis yang menyertainya. Padahal, laporan keuangan yang mencakup informasi biaya lingkungan tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab internal, tetapi juga alat komunikasi kepada publik (Ikhsan, 2021).

Penerapan akuntansi lingkungan di sektor layanan kesehatan memiliki urgensi tinggi. Tidak hanya untuk efisiensi biaya, namun juga untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Laporan biaya lingkungan seharusnya dapat disajikan secara eksplisit dalam laporan keuangan agar menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan baik di tingkat institusi maupun oleh pemerintah daerah. Untuk itu, perlunya evaluasi secara mendalam terhadap bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dilakukan pada unit pelayanan kesehatan.

2. Kajian Teori

Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) merupakan salah satu cabang akuntansi yang berperan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas organisasi yang berdampak terhadap lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2021), akuntansi lingkungan tidak hanya memuat data keuangan, tetapi juga mencakup informasi tentang biaya lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, serta pemulihan lingkungan yang terdampak. Penerapan akuntansi ini menjadi penting dalam konteks organisasi publik, termasuk Puskesmas, karena erat kaitannya dengan transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sosial.

Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada manajemen dan stakeholder agar mereka dapat membuat keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Ikhsan dan Ishak (2020) menyebutkan bahwa informasi akuntansi lingkungan dapat digunakan sebagai alat manajemen lingkungan sekaligus sebagai bentuk komunikasi kepada publik mengenai komitmen institusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi akuntansi lingkungan terbagi dua, yaitu fungsi internal sebagai dasar pengendalian dan efisiensi biaya, dan fungsi eksternal untuk melaporkan kinerja lingkungan kepada pihak luar.

Dalam implementasinya, akuntansi lingkungan melibatkan pengeluaran yang dikenal sebagai biaya lingkungan. Trikusuma (2021) menyatakan bahwa biaya lingkungan meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya-biaya ini mencerminkan tanggung jawab

organisasi dalam mencegah atau menangani kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional, termasuk pengelolaan limbah padat, cair, maupun gas.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki potensi besar dalam menghasilkan limbah medis dan nonmedis yang membahayakan lingkungan. Limbah tersebut perlu dikelola secara tepat sesuai standar, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 18 Tahun 2020. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah padat infeksius, limbah domestik, limbah cair, serta limbah gas hasil pembakaran. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan menjadi alat penting dalam merekam seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah tersebut.

Di Indonesia, penerapan akuntansi lingkungan belum diatur secara eksplisit dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), namun institusi pemerintah dapat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Permatasari (2022) menjelaskan bahwa proses akuntansi lingkungan umumnya mencakup lima tahap, yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan. Identifikasi dilakukan untuk mengenali jenis dan sumber biaya, pengakuan dilakukan saat manfaat dari biaya tersebut diterima, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai historis, dan penyajian serta pengungkapan dilakukan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab institusi.

Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, akuntansi lingkungan menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini relevan diterapkan pada Puskesmas Cipageran, sebagai unit pelayanan publik yang tidak hanya berkewajiban memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penerapan akuntansi lingkungan pada perlakuan biaya lingkungan yang dilakukan oleh Puskesmas Cipageran Kota Cimahi. Pola pendekatan yang digunakan dalam analisis data bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan dari temuan-temuan lapangan menuju pada generalisasi yang relevan terhadap teori.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan lingkungan serta perlakuan akuntansinya yang dilakukan oleh Puskesmas Cipageran sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pelayanan kesehatan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan peran langsung terhadap pengelolaan limbah serta penyusunan laporan keuangan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi bagian keuangan dan bagian kesehatan lingkungan Puskesmas Cipageran.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan kunci serta observasi terhadap lingkungan dan sistem pengelolaan limbah. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen internal seperti laporan keuangan, peraturan terkait, catatan pengeluaran biaya lingkungan, serta dokumentasi aktivitas pengelolaan limbah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-struktural, observasi langsung ke lokasi puskesmas, dan dokumentasi terhadap laporan serta kebijakan terkait pengelolaan limbah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta membandingkannya dengan teori dan regulasi yang relevan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai sejauh mana akuntansi lingkungan telah diterapkan oleh Puskesmas Cipageran, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi lingkungan di Puskesmas Cipageran Kota Cimahi, khususnya dalam perlakuan terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Hasil

penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak internal puskesmas, dan telaah dokumentasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan dan kesehatan lingkungan, diketahui bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Puskesmas Cipageran sudah meliputi lima tahapan, yaitu: identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum ada pemisahan secara eksplisit dalam laporan keuangan untuk kategori biaya lingkungan.

Pada tahap identifikasi, biaya lingkungan masih digolongkan sebagai biaya umum, khususnya untuk pengelolaan limbah medis dan domestik. Pencatatan dilakukan dalam pos belanja barang dan jasa. Pengakuan biaya dilakukan berdasarkan saat terjadinya pengeluaran kas, dengan metode akuntansi berbasis kas. Untuk pengukuran, puskesmas menggunakan pendekatan biaya historis dan mengacu pada volume limbah yang dihasilkan setiap bulan. Misalnya, untuk satu kilogram limbah medis padat dikenakan biaya Rp13.000,00, sedangkan untuk limbah domestik, biaya berkisar Rp220.000,00 per bulan.

Dalam aspek penyajian, belum tersedia laporan khusus untuk biaya lingkungan. Biaya tersebut masih dicampurkan dalam akun belanja administrasi dan umum. Sementara untuk pengungkapan, laporan hanya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan tidak dipublikasikan secara terbuka karena dianggap sebagai dokumen internal yang bersifat rahasia.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tidak adanya operator khusus untuk mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga pengawasan dilakukan secara bergilir oleh staf kesehatan lingkungan, penjaga, dan petugas keamanan.
2. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terkait laporan biaya lingkungan yang terpisah, sehingga staf keuangan tidak menyusun laporan khusus untuk hal tersebut.

B. Pembahasan

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, Puskesmas Cipageran telah menjalankan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan akuntansi lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori dari Ikhsan dan Ishak (2020) yang menyebutkan bahwa akuntansi lingkungan mencakup aktivitas identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan secara sistematis. Namun, secara praktik, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik yang ideal, karena belum adanya laporan khusus yang memuat biaya lingkungan secara terpisah.

Jika dibandingkan dengan teori Hansen dan Mowen (2021), pengelolaan biaya lingkungan seharusnya dipisahkan dari biaya operasional lainnya agar memudahkan evaluasi dan pertanggungjawaban. Ketiadaan laporan khusus ini juga menghambat keterbukaan informasi bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, padahal akuntansi lingkungan berfungsi sebagai sarana komunikasi publik.

Kendala teknis lainnya seperti belum adanya operator IPAL menunjukkan bahwa kesadaran institusi terhadap pentingnya keberlanjutan masih terbatas pada aspek operasional dan belum masuk ke dalam strategi jangka panjang. Hal ini juga menjadi indikator bahwa aspek lingkungan belum diprioritaskan secara maksimal dalam pengelolaan puskesmas.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi lingkungan di Puskesmas Cipageran masih bersifat administratif dan belum strategis. Diperlukan regulasi yang lebih eksplisit dari pemerintah, khususnya dalam SAP atau regulasi teknis Dinas Kesehatan, untuk mewajibkan pelaporan biaya lingkungan sebagai bagian dari transparansi pengelolaan keuangan publik.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Puskesmas Cipageran Kota Cimahi sudah mencakup lima tahapan penting yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun, penerapannya belum optimal karena belum adanya laporan khusus yang memuat biaya lingkungan secara terpisah. Biaya lingkungan masih digabungkan dalam belanja administrasi dan umum, serta pengungkapannya hanya terbatas untuk laporan internal kepada Dinas Kesehatan tanpa akses publik.

Selanjutnya, perlakuan terhadap biaya lingkungan di Puskesmas Cipageran masih menggunakan pendekatan berbasis kas dan biaya historis, serta disesuaikan dengan volume limbah yang dihasilkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan akuntansi lingkungan di antaranya adalah belum adanya operator khusus untuk mengelola

IPAL dan tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan penyusunan laporan biaya lingkungan secara terpisah.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Cipageran, disarankan untuk mulai menyusun laporan biaya lingkungan secara terpisah agar informasi lebih transparan dan mudah dianalisis, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Selain itu, perlu adanya pelatihan atau penugasan khusus bagi petugas operator IPAL agar pengelolaan limbah dapat dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah atau regulator, khususnya Dinas Kesehatan dan instansi yang berwenang dalam pengaturan akuntansi sektor publik, sebaiknya mempertimbangkan penerbitan regulasi yang mewajibkan penyajian biaya lingkungan secara eksplisit dalam laporan keuangan instansi layanan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepedulian terhadap dampak lingkungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model pelaporan biaya lingkungan di sektor layanan publik lainnya. Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang fokus pada pengembangan format pelaporan atau evaluasi efektivitas kebijakan akuntansi lingkungan yang sudah diterapkan.

6. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam terselenggaranya kegiatan riset ilmiah di bidang manajemen dan akuntansi ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan penelitian ini. Dukungan dari pihak institusi akademik, narasumber penelitian, mitra penelitian di lapangan, serta rekan-rekan sejawat sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan riset ini. Semoga segala bentuk bantuan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan akuntansi.

7. Referensi

- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2021). *Managerial Accounting* (12th ed.). Cengage Learning.
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2020). *Akuntansi Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permatasari, N. (2022). Penerapan Environmental Accounting dalam Organisasi Publik. *Jurnal Akuntansi dan Lingkungan*, 6(2), 45–58.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Trikusuma, R. (2021). Penerapan Biaya Lingkungan di Lembaga Pemerintah. *Lintas Ekonomi*, 18(1), 12–20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.